**ANALISIS KINERJA KEUANGAN DENGAN MENGGUNAKAN PENDEKATAN *VALUE FOR MONEY***

(Studi Kasus pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Provinsi Sumatera Barat Periode 2016-2018)

***A financial performance analysis with Value for money approach***

**(*A Case Study in Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu***

***Provinsi Sumatera Barat 2016-2018* )**

**Novli Yanti; Agus Sutardjo; Sri Yuli Ayu Putri**

*Fakultas Ekonomi Universitas Ekasakti Padang*

*E-mail:* [*nonboy20@gmail.com*](mailto:nonboy20@gmail.com)

**ABSTRAK**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Kinerja Keuangan pada Dinas Penanaman Modal dan PTSP Provinsi Sumatera Barat pada tahun 2016 sampai dengan tahun 2018 dengan menggunakan pendekatan *value for money*.

Jenis penelitian yang digunakan adalah studi kasus pada Dinas Penanaman Modal dan PTSP Provinsi Sumatera Barat. Teknik pengumpulan data yang digunakan berupa wawancara, observasi dan dokumentasi. Dalam penelitian ini, pengukuran nilai ekonomi membandingkan antara realisasi pengeluaran dengan anggaran pengeluaran. Nilai efisiensi menggunakan perbandingan antara *output* dan *input*, sedangkan nilai efektivitas membandingkan antara *outcome* dan *output.*

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Kinerja Keuangan Dinas Penanaman Modal dan PTSP Provinsi Sumatera Barat pada tahun 2016 sampai dengan tahun 2018 menunjukkan kinerja yang ekonomis, efisien dan efektif.

Kata kunci: *value for money*, ekonomi, efisiensi, efektivitas.

**ABSTRACT**

The aim of this research is to assess the performance of *Dinas Penanaman Modal dan PTSP Provinsi Sumatera Barat* in 2016 to 2018 by value for money approach.

This research is a case study research in Dinas Penanaman Modal dan PTSP Provinsi Sumatera Barat. The data is collected by conducting interview, observation and documentary analysis. In this research, the actual budget expenditure was compared with budget plans to measure economic value. The efficiency value is measured by comparing the output with the input, while the value of effectiveness is measured by comparing the outcomes with the outputs*.*

This study indicates that performance of Dinas Penanaman Modal dan PTSP Provinsi Sumatera Barat from 2016 to 2018 have been economic, efficient, and effective.

Keywords: value for money, economy, efficiency, effectiveness

**PENDAHULUAN**

**Latar Belakang**

Kinerja instansi pemerintah kini menjadi sorotan dengan semakin tingginya kesadaran masyarakat terhadap penyelenggaraan administrasi publik.Masyarakat yang semakin cerdas dan kritis juga menuntut dilakukannya transparansi dan akuntabilitas publik oleh lembaga-lembaga sektor publik.Pemerintah daerah dituntut mampu menciptakan sistem manajemen yang mampu mendukung operasionalisasi daerah. Salah satu aspek dari pemerintah daerah yang harus diatur secara hati-hati adalah masalah pengelolaan keuangan daerah dan anggaran daerah.

Pengukuran kinerja sangat penting untuk menilai akuntabilitas pemerintah daerah dalam melakukan pengelolaan keuangan daerah. Akuntabilitas bukan sekedar kemampuan menunjukkan bagaimana uang publik dibelanjakan, akan tetapi meliputi kemampuan yang menunjukkan bahwa uang publik tersebut

telah dibelanjakan secara ekonomis, efisien, dan efektif.

Salah satu hal yang dapat dijadikan alat untuk menilai pertanggungjawaban suatu instansi pemerintah adalah dengan melihat kinerja keuangannya melalui perhitungan dan analisis pencapaian target dan realisasi dari penerimaan dan pengeluaran atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), baik dari sisi *input, output, outcome, impact, dan benefitnya*.

Inti pengukuran kinerja keuangan pada organisasi pemerintah adalah *Value for Money*. *Value For Money* dalam konteks otonomi daerah merupakan jembatan untuk menghantarkan pemerintah daerah mencapai *good governance*. Guna mendukung dilakukannya pengelolaan dana publik (*publik money*) yang mendasarkan konsep *Value For Money*, maka diperlukan sistem pengelolaan keuangan daerah dan anggaran daerah yang baik. Hal tersebut dapat tercapai apabila pemerintah daerah memiliki sistem akuntansi yang baik. *Value For Money* merupakan indikator yang memberikan informasi apakah anggaran (dana) yang dibelanjakan menghasilkan suatu nilai tertentu bagi masyarakatnya. Indikatornya yaitu ekonomis, efisiensi dan efektivitas.

Menurut Mahmudi (2015:83), ekonomi memiliki pengertian bahwa sumber daya *input* hendaknya diperoleh dengan harga lebih rendah, yaitu harga yang mendekati hargapasar.Efisiensi merupakan perbandingan antara *output* dengan *input*dan efektivitas terkait dengan hubungan antara hasil yang diharapkan dengan hasil yang sesungguhnya dicapai.

Beberapa penelitian terdahulu yang berhubungan dengan *Value For Money* dilakukan oleh Khikmah (2014), Kurrohman (2012), Purnama (2014). Hasil penelitiannya menyimpulkan bahwa kinerja organisasi publik belum sepenuhnya mengaplikasikan prinsip *Value For Money* yaitu efisien, efektif, dan ekonomis. Misalnya pengukuran kinerja di Pemda Istimewa Yogyakarta menunjukkan bahwa kinerjanya cukup efisien dan ekonomis tetapi kurang efektif. Dengan demikian penelitian serupa perlu dianalisis kembali di lingkungan organisasi publik lainnya. Untuk itu penelitian ini akan dilakukan di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat. Daerah dan Fasilitasi Kerjasama Dunia Usaha. Provinsi di Bidang Penanaman Modal, Pelayanan Kebijakan keuangan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat dalam mengelola APBD adalah meningkatkan efisiensi dan efektifitas belanja daerah.

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat merupakan unsur pelaksana urusan Pemerintah Terpadu Satu Pintu (PTSP), Kerjasama Investasi Kebijakan di bidang pengeluaran ditempuh dengan menentukan prioritas dan rasionalitas belanja baik belanja operasi maupun modal melalui penghematan yang diiringi dengan rasionalisasi anggaran. Namun demikian, efisiensi yang dilaksanakan tidak mengurangi kinerja yang ditargetkan pada masing-masing program dan kegiatan.

Capaian kinerja keuangan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat Provinsi Sumatera Barat dalam pelaksanaan dan pengelolaan APBD tahun 2016 dapat diuraikan sebagai berikut, total realisasi belanja tercatat sebesar Rp.8.284.623.544,00, sedangkan jumlah yang dianggarkan sebesar Rp.8.838.488.705,00. Dari hasil pelaksanaan kegiatan tahun anggaran 2016 diperoleh realisasi pendapatan sebesar Rp.733.605.720,00, sedangkan pendapatan yang dianggarkan sebesar Rp.617.000.000,00.

Pada tahun 2017, total realisasi belanja tercatat sebesar Rp.14.598.354.129,00, sedangkan jumlah yang dianggarkan sebesar Rp.15.382.080.537,00. Dari hasil pelaksanaan kegiatan tahun anggaran 2017 diperoleh realisasi pendapatan sebesar Rp.775.471.800,00, sedangkan jumlah yang dianggarkan sebesar Rp.746.570.000,00.

Pada tahun 2018, total realisasi belanja tercatat sebesar Rp.16.817.410.533,00, sedangkan jumlah yang dianggarkan sebesar Rp.17.214.917.090,32. Dari hasil pelaksanaan kegiatan tahun anggaran 2018 diperoleh realisasi pendapatan sebesar Rp.881.059.600,00, sedangkan jumlah yang dianggarkan sebesar Rp.984.855.100,00.

Berdasarkan latar belakang di atas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul :

“Analisis Kinerja Keuangan dengan menggunakan Pendekatan *Value For Money* (Studi Kasus Pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat Periode 2016-2018)”.

**Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang maka dapat dirumuskan beberapa masalah sebagai berikut : bagaimana kinerja keuangan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat periode 2016-2018 ditinjau dari segiekonomi?, bagaimana kinerja keuangan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu PintuProvinsi Sumatera Barat periode 2016-2018 ditinjau dari segi efisiensi?, bagaimana kinerja keuangan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat periode 2016-2018 ditinjau dari segi efektifitas

**LANDASAN TEORI**

**Pengertian Kinerja**

Menurut Mohammad Mahsun (2012:25), kinerja adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan/program/kebijaksanaan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi dan visi organisasi yang tertuang dalam perumusan skema strategi (*strategic planning*).

**Indikator Kinerja**

Menurut Abdullah (2014:145), indikator kinerja adalah ukuran kuantitatif dan kualiatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan, dengan memperhitungkan indikator masukan (*inputs*), keluaran (*outputs*), hasil (*outcomes*), manfaat (*benefits*), dan dampak(*impacts*).

**Pengertian Pengukuran Kinerja**

Pengukuran kinerja menurut Deddi Nordiawan dan Ayuningtyas Hertianti (2014:158) adalah tindakan pengukuran yang dilakukan terhadap berbagai aktivitas dalam rantai nilai yang ada pada perusahaan.

**Tujuan dan Manfaat Pengukuran Kinerja**

Menurut Mahmudi (2010:14), tujuan pengukuran atau penilaian kinerja dalam sektor publik antara lain sebagai berikut : mengetahui tingkat ketercapaian tujuan organisasi, menyediakan sarana pembelajaran pegawai, memperbaiki kinerja periode-periode berikutnya, memberikan pertimbangan yang sistematik dalam pembuatan keputusan pemberian *reward* dan *punishment,* memotivasi pegawai, menciptakan akuntabilitas public.

**Pengertian *Value For Money***

*Value For Money* merupakan konsep pengelolaan organisasi sektor publik yang mendasarkan pada tiga elemen utama, yaitu ekonomis, efisiensi, dan efektivitas. Menurut Halim dan Kusufi (2013:132) *Value For Money* juga mengandung arti sebagai penghargaan terhadap nilai uang.

**Teknik Pengukuran *Value For Money***

Teknik pengukuran *Value For Money* ada 3 meliputi tingkat ekonomi, efisiensi dan efektivitas. Dimana pengertian dari masing-masing elemen tersebut adalah :

1. Tingkat Ekonomi

Ekonomis (kehematan) sebagai tingkat biaya yang dikeluarkan untuk melaksanakan suatu kegiatan atau memperoleh sesuatu. Sebenarnya ekonomis berhubungan dengan biaya operasi (*cost of operation*). Untuk melihat seberapa besar tingkat ekonomis sebuah anggaran bisa dilihat dari berapa persentase tingkat pencapaian.

1. Tingkat Efisiensi

Efisiensi (daya guna) berhubungan dengan metode operasi (*methodoperation*). Proses kegiatan operasional dapat dikatakan efisien apabila suatu produk atau hasil karya tertentu mempergunakan sumber daya dan biaya yang serendah-rendahnya. Efisiensi merupakan perbandingan antara *output* dengan *input*.

1. Tingkat Efektivitas

Efektivitas (hasil guna) adalah ukuran keberhasilan suatu organisasi dalam usaha mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan. Efektivitas merupakan pebandingan *outcome dan output*.

***Value For Money* Sebagai Metode Penilaian Kinerja**

*Value For Money* merupakan inti pengukuran kinerja pada organisasi pemerintah dan sektor *publik*. Kinerja pemerintah tidak dapat dinilai dari sisi *output* yang dihasilkan semata, akan tetapi secara terintegrasi harus mempertimbangkan *input, output*, dan *outcome* secara bersama-sama.

**Langkah-Langkah Pengukuran *Value For Money***

1. Pengukuran Ekonomi

Pengukuran ekonomi hanya mempertimbangkan masukan (*input*) yang gunakan. Apabila sumber daya yang dikeluarkan berada di bawah anggaran maka terjadi penghematan. Sebaliknya, apabila sumber daya yang dikeluarkan di atas anggaran maka terjadi pemborosan. Ekonomis dapat dirumuskan sebagai berikut (Mahmudi, 2011:21) :

x 100%

1. Pengukuran Efisiensi

Efisiensi dapat diukur dengan rasio antara *output* dengan *input*. Renyowijoyo (2013:4) menyebutkan bahwa efisiensi merupakan pencapaian keluaran (*output*) yang maksimum dengan masukan tertentu atau penggunaan masukan terendah untuk mencapai keluaran tertentu. Semakin besar *output* dibandingkan *input*, maka semakin tinggi tingkat efisiensi suatu organisasi. Efisiensi dapat dirumuskan sebagai berikut (Mahmudi, 2011:22).

x 100%

1. Pengukuran Efektivitas

Efektivitas adalah ukuran berhasil tidaknya suatu organisasi mencapai tujuannya. Semakin tinggi nilai rasio efektivitas, maka suatu kegiatan/program dikatakan lebih efektif. Secara sederhana, efektivitas merupakan perbandingan *outcome* dengan *output*. Efektivitas dirumuskan sebagai berikut (Mahmudi, 2011:22):

**Tujuan dan Manfaat *Value For Money***

Tujuan pelaksanaan *value for money* adalah, ekonomi: hemat cermat dalam pengadaan dan alokasi sumber daya, efisiensi: berdaya guna dalam penggunaan sumber daya, efektivitas: berhasil guna dalam arti mencapai tujuan dan sasaran.

**Kerangka Konseptual**

Gambar 2.1 Kerangka Konseptual

Laporan Realisasi Anggaran, LAKIP dan LKPJ Dinas Penanaman Modal dan PTSP Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2016- 2018

Bagaimana pengukuran kinerja keuangan Dinas Penanaman Modal dan PTSP Provinsi Sumatera Barat dengan menggunanakan pendekatan *Value for Money* dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2018

***Value For Money*:**

1. Analisis Rasio Ekonomis
2. Analisis Rasio Efisiensi
3. Analisis Rasio Efektifitas

Kinerja Keuangan Dinas Penanaman Modal dan PTSP Provinsi Sumatera Barat Tahun anggaran 2016-2018

**METODE PENELITIAN**

**Jenis Data**

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data dokumentasi dan data kuantitatif. Dokumentasi adalah suatu usaha yang dilakukan dalam penelitian untuk pengumpulan data dengan menggunakan dokumen perusahaan. Adapun data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data laporan keuangan yaitu Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Kinerja dan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban.

**Sumber Data**

Sumber data untuk mendukung penelitian ini adalah menggunakan data primer dan data sekunder. Data primer merupakan sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data (Sugiono, 2013:193). Data primer dalam penelitian ini adalah Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Kinerja dan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu pintu Provinsi Sumatera Barat untuk Tahun Anggaran 2016- 2018, data ini penulis dapatkan dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat. Data Sekunder merupakan sumber data yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data (Sugiono, 2013:193). Data sekunder penelitian ini berasal dari buku, jurnal-jurnal, tesis, skripsi, serta dari internet yang berkaitan dengan kinerja keuangan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu pintu Provinsi Sumatera Barat.

**Populasi**

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek/subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari kemudian ditarik kesimpulan (Sugiyono, 2015). Populasi dalam penelitian ini adalah Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Kinerja dan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat.

**Sampel**

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut (Sugiyono, 2015). Syarat utama dalam pengambilan sampel suatu populasi adalah sampel harus mewakili populasi dan harus dalam bentuk kecil. Sampel dalam penelitian ini adalah Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Kinerja dan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat tahun 2016 sebanyak 49 kegiatan, tahun 2017 sebanyak 38 kegiatan, dan tahun 2018 sebanyak 56 kegiatan.

**Metode Analisis**

Analisis data yang digunakan adalah secara deskriptif kuantitatif yaitu analisis yang didasarkan pada perhitungan untuk mengetahui tingkat rasio. Rasio yang digunakan untuk mengukur kinerja melalui konsep *value for money* yang dikembangkan dalam keuangan adalah sebagai berikut:

1. Rasio Ekonomi

Rasio ekonomi menggambarkan keterkaitan konsep biaya untuk memperoleh unit *input*. Formulasi yang digunakan untuk mengukur tingkat ekonomi adalah :

Pengukuran tingkat ekonomis memerlukan data-data anggaran pengeluaran dan realisasi pengeluaran. Dimana nilai *Input* merupakan realisasi pengeluaran, sedangkan nilai harga *input* merupakan anggaran pengeluaran. Adapun kriteria ekonomi menurut Mahsun (2012) adalah :

Jika diperoleh nilai kurang dari 100% (X < 100%), maka ekonomis, jika diperoleh nilai sama dengan 100% (X = 100%), maka ekonomis berimbang,dan jika diperoleh nilai lebih dari 100% (X > 100%), maka tidak ekonomis.

1. Rasio Efisiensi

Efisiensi dapat diukur dengan membandingkan rasio antara *output* dan *input*. Semakin besar rasio berarti semakin tinggi tingkat efisiensinya. Formulasinya adalah :

x 100%

Dimana nilai *output* merupakan hasil persentase perhitungan realisasi fisik lapangan dari setiap kegiatan yang ada, sedangkan nilai *input* merupakan persentase antara dana yang digunakan dengan dana yang dianggarkan oleh pemerintah. Adapun kriteria efisien menurut Mahsun (2012) adalah :

Jika diperoleh nilai kurang dari 100% (X < 100%), maka tidak efisien, jika diperoleh nilai sama dengan 100% (X = 100%), maka efisien berimbang, dan jika diperoleh nilai lebih dari 100% (X > 100%), maka efisien.

1. Rasio Efektivitas

Rasio efektivitas menggambarkan tingkat pencapaian hasil dari program dengan target yang ditetapkan .Efektivitas adalah ukuran berhasil tidaknya suatu organisasi mencapai tujuannya. Apabila suatu organisasi berhasil mencapai tujuan, maka organisasi tersebut dikatakan telah berjalan dengan efektif. Secara sederhana efektivitas dapat diukur dengan memperbandingkan antara *outcome* dan *output.* Formulasinya adalah sebagai berikut :

Dimana nilai *outcome* merupakan capaian kinerja, sedangkan nilai *output* merupakan target. Pada LAKIP Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat capaian kinerja tidak disajikan pada tiap program/kegiatan melainkan disajikan berdasarkan pencapaian Sasaran dengan beberapa Indikator Kinerja. Keberhasilan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat juga bisa diukur dari realisasi pendapatan retribusinya. Adapun kriteria efektif menurut Mahsun (2012) adalah :

Jika diperoleh nilai kurang dari 100% (X < 100%), maka tidak efektif, jika diperoleh nilai sama dengan 100% (X = 100%), maka efektif berimbang., dan jika diperoleh nilai lebih dari 100% (X > 100%), maka efektif.

**Hasil Dan Pembahasan**

**Analisis Data**

Pada penelitian ini peneliti menggunakan metode *Value For Money* yaitu suatu metode pengukuran kinerja organisasi dengan menilai 3 (tiga) aspek yaitu ekonomi, efisiensi dan efektivitas.

1. Berdasarkan analisis ekonomi yang telah dilakukan oleh penulis mengenai kinerja keuangan di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat, maka disimpulkan bahwa pada tahun 2016 terdapat 49 kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat yang terdiri dari :

**Tabel 4.1**

**Perhitungan Ekonomi Kegiatan Tahun 2016**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **Jumlah Kegiatan** | **%** |
| Ekonomis | 44 | 89,80 |
| Ekonomis Berimbang | 5 | 10,20 |
| Tidak Ekonomis | 0 | 0 |

Dari 49 kegiatan, hasil analisis menunjukkan bahwa kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat telah ekonomis dengan jumlah kegiatan 44 (89,80%), ekonomis berimbang dengan jumlah kegiatan 5 (10,20%), dan tidak ekonomis 0 kegiatan (0%).

Berdasarkan analisis ekonomi yang telah dilakukan oleh penulis mengenai kinerja keuangan di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat, maka disimpulkan bahwa pada Tahun 2017 terdapat 38 kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat yang terdiri dari :

**Tabel 4.2**

**Perhitungan Ekonomi Kegiatan Tahun 2017**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **Jumlah Kegiatan** | **%** |
| Ekonomis | 35 | 92,10 |
| Ekonomis Berimbang | 3 | 7,90 |
| Tidak Ekonomis | 0 | 0 |

Dari 38 kegiatan, hasil analisis menunjukkan bahwa kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat telah ekonomis dengan jumlah kegiatan 35 (92,10%), ekonomis berimbang dengan jumlah kegiatan 3 (7,90%), dan tidak ekonomis 0 kegiatan (0%).

Berdasarkan analisis ekonomi yang telah dilakukan oleh penulis mengenai kinerja keuangan di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat, maka disimpulkan bahwa pada Tahun 2018 terdapat 56 kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat yang terdiri dari :

**Tabel 4.3**

**Perhitungan Ekonomi Kegiatan Tahun 2018**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **Jumlah Kegiatan** | **%** |
| Ekonomis | 51 | 91,10 |
| Ekonomis Berimbang | 5 | 8,90 |
| Tidak Ekonomis | 0 | 0 |

Dari 56 kegiatan, hasil analisis menunjukkan bahwa kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat telah ekonomis dengan jumlah kegiatan 51 (91,10%), ekonomis berimbang dengan jumlah kegiatan 5 (8,90%), dan tidak ekonomis 0 kegiatan (0%)

1. Berdasarkan analisis efisiensi yang telah dilakukan oleh penulis mengenai kinerja keuangan di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat, maka disimpulkan bahwa pada tahun 2016 terdapat 49 kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat yang terdiri dari :

**Tabel 4.4**

**Perhitungan Efisiensi Kegiatan Tahun 2016**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **Jumlah Kegiatan** | **%** |
| Efisien | 44 | 89,80 |
| Efisien Berimbang | 5 | 10,20 |
| Tidak Efisien | 0 | 0 |

Pada tahun 2016 kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat dengan total 49 kegiatan, menunjukkan hasil efisien sebesar 44 kegiatan (89,80%), efisiensi berimbang sebesar 5 kegiatan (10,20%), dan tidak efisien 0 kegiatan (0%).

Berdasarkan analisis efisiensi yang telah dilakukan oleh penulis mengenai kinerja keuangan di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat, maka disimpulkan bahwa pada Tahun 2017 terdapat 38 kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat yang terdiri dari :

**Tabel 4.5**

**Perhitungan Efisiensi Kegiatan Tahun 2017**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **Jumlah Kegiatan** | **%** |
| Efisien | 35 | 92,10 |
| Efisien Berimbang | 3 | 7,90 |
| Tidak Efisien | 0 | 0 |

Pada tahun 2017 kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat dengan total 38 kegiatan, menunjukkan hasil efisien sebesar 35 kegiatan (92,10%), efisiensi berimbang sebesar 3 kegiatan (7,90%), dan tidak efisien 0 kegiatan (0%).

Berdasarkan analisis efisiensi yang telah dilakukan oleh penulis mengenai kinerja keuangan di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat, maka disimpulkan bahwa pada Tahun 2018 terdapat 56 kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat yang terdiri dari :

**Tabel 4.6**

**Perhitungan Efisiensi Kegiatan Tahun 2018**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **Jumlah Kegiatan** | **%** |
| Efisien | 51 | 91,10 |
| Efisien Berimbang | 5 | 8,90 |
| Tidak Efisien | 0 | 0 |

Pada tahun 2018 kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat dengan total 56 kegiatan, menunjukkan hasil efisien sebesar 51 kegiatan (91,10%), efisiensi berimbang sebesar 5 kegiatan (8,90%), dan tidak efisien 0 kegiatan (0%)

Pada LAKIP Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat capaian kinerja tidak disajikan pada tiap program/kegiatan melainkan disajikan berdasarkan pencapaian tujuan, sasaran strategis dengan indikator kinerja yang telah ditetapkan. Keberhasilan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat juga bisa diukur dari realisasi pendapatan retribusinya. Pengukuran tingkat capaian kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat dilakukan dengan cara membandingkan antara realisasi pencapaian indikator sasaran yang telah ditetapkan dalam penetapan kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat dengan targetnya.

1. Berdasarkan analisis efektivitas yang telah dilakukan oleh penulis mengenai kinerja keuangan di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat, maka disimpulkan bahwa pada tahun 2016 realisasi pendapatan dan 4 sasaran strategis yang telah dilaksanakan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat yang terdiri dari :

**Tabel 4.7**

**Perhitungan Efektivitas Kegiatan Tahun 2016**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **Jumlah** | **%** |
| Efektif | 4 | 80 |
| Efektif Berimbang | 0 | 0 |
|  | **Jumlah** | **%** |
| Tidak Efektif | 1 | 20 |

Pada tahun 2016 kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat yang diperoleh dari realisasi pendapatan dan 4 sasaran strategis menunjukkan hasil efektif ada 4 (80%) diperoleh dari realisasi pendapatan dan sasaran strategis yang pertama yaitu meningkatnya realisasi investasi, sasaran strategis kedua yaitu meningkatnya minat dan keinginan investor untuk menanamkan modalnya, dan sasaran strategis ketiga yaitu meningkatnya kenyamanan berusaha bagi investor. Sedangkan hasil tidak efektif ada 1 (20%) yaitu dari sasaran strategis keempat yaitu meningkatnya kualitas pelayanan satu pintu .

Berdasarkan analisis efektivitas yang telah dilakukan oleh penulis mengenai kinerja keuangan di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat, maka disimpulkan bahwa pada Tahun 2017 realisasi pendapatan dan 3 sasaran strategis yang telah dilaksanakan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat yang terdiri dari :

**Tabel 4.8**

**Perhitungan Efektivitas Kegiatan Tahun 2017**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **Jumlah** | **%** |
| Efektif | 3 | 75 |
| Efektif Berimbang | 0 | 0 |
| Tidak Efektif | 1 | 25 |

Pada tahun 2017 kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat yang diperoleh dari realisasi pendapatan dan 3 sasaran strategis menunjukkan hasil efektif ada 3 (75%) diperoleh dari realisasi pendapatan dan sasaran strategis yang pertama yaitu meningkatnya tata kelola organisasi, sasaran strategis kedua yaitu meningkatnya realisasi investasi. Sedangkan hasil tidak efektif ada 1 (25%) yaitu dari sasaran strategis ketiga yaitu meningkatnya kualitas pelayanan terpadu satu pintu.

Berdasarkan analisis efektivitas yang telah dilakukan oleh penulis mengenai kinerja keuangan di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat, maka disimpulkan bahwa pada Tahun 2018 realisasi pendapatan dan 3 sasaran strategis yang telah dilaksanakan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat yang terdiri dari :

**Tabel 4.9**

**Perhitungan Efektivitas Kegiatan Tahun 2018**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **Jumlah** | **%** |
| Efektif | 3 | 75 |
| Efektif Berimbang | 0 | 0 |
| Tidak Efektif | 1 | 25 |

Pada tahun 2018 kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat yang diperoleh dari realisasi pendapatan dan 3 sasaran strategis menunjukkan hasil efektif ada 3 (75%) diperoleh dari sasaran strategis pertama yaitu meningkatnya tata kelola organisasi, sasaran strategis yang kedua yaitu meningkatnya realisasi investasi, dan sasaran strategis yang ketiga yaitu meningkatnya kualitas pelayanan terpadu satu pintu. Hasil tidak efektif ada 1 yaitu pada realisasi pendapatan (25%).

**Pembahasan**

Berdasarkan analisis *Value For Money* terhadap kinerja keuangan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat yang menilai aspek ekonomi, efisiensi dan efektivitas, maka penulis menyimpulkan hasil sebagai berikut :

* + - 1. Ekonomi

Pada tahun 2016 dari perbandingan *input* dan harga seluruh kegiatan yang dilakukan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat diperoleh hasil sebesar 90,23% sehingga dapat dikatakan ekonomis, yang artinya Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat telah mampu mengelola keuangan dengan baik dan menggunakan anggaran dengan hemat, karena realisasi anggaran lebih kecil daripada yang telah dianggarkan.

Pada tahun 2017 dari perbandingan *input* dan harga seluruh kegiatan yang dilakukan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat diperoleh hasil sebesar 96,02% sehingga dapat dikatakan ekonomis, yang artinya Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat telah mampu mengelola keuangan dengan baik dan menggunakan anggaran dengan hemat, karena realisasi anggaran lebih kecil daripada yang telah dianggarkan.

Pada tahun 2018 dari perbandingan *input* dan harga seluruh kegiatan yang dilakukan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat diperoleh hasil sebesar 98,69% sehingga dapat dikatakan ekonomis, yang artinya Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat telah mampu mengelola keuangan dengan baik dan menggunakan anggaran dengan hemat, karena realisasi anggaran lebih kecil daripada yang telah dianggarkan.

* + - 1. Efisiensi

Pada tahun 2016 kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat dengan total 49 kegiatan, menunjukkan hasil efisien sebesar 44 kegiatan (89,80%), efisiensi berimbang sebesar 5 kegiatan (10,20%), dan tidak efisien 0 kegiatan (0%).

Pada tahun 2017 kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat dengan total 38 kegiatan, menunjukkan hasil efisien sebesar 35 kegiatan (92,10%), efisiensi berimbang sebesar 3 kegiatan (7,90%), dan tidak efisien 0 kegiatan (0%).

Pada tahun 2018 kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat dengan total 56 kegiatan, menunjukkan hasil efisien sebesar 51 kegiatan (91,10%), efisiensi berimbang sebesar 5 kegiatan (8,90%), dan tidak efisien 0 kegiatan (0%).

* + - 1. Efektifitas

Pada tahun 2016 kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat yang diperoleh dari realisasi pendapatan dan 4 sasaran strategis menunjukkan hasil efektif ada 4 (80%) diperoleh dari realisasi pendapatan dan sasaran strategis yang pertama yaitu meningkatnya realisasi investasi, sasaran strategis kedua yaitu meningkatnya minat dan keinginan investor untuk menanamkan modalnya, dan sasaran strategis ketiga yaitu meningkatnya kenyamanan berusaha bagi investor. Sedangkan hasil tidak efektif ada 1 (20%) yaitu dari sasaran strategis keempat yaitu meningkatnya kualitas pelayanan satu pintu .

Pada tahun 2017 kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat yang diperoleh dari realisasi pendapatan dan 3 sasaran strategis menunjukkan hasil efektif ada 3 (75%) diperoleh dari realisasi pendapatan dan sasaran strategis yang pertama yaitu meningkatnya tata kelola organisasi, sasaran strategis kedua yaitu meningkatnya realisasi investasi. Sedangkan hasil tidak efektif ada 1 (25%) yaitu dari sasaran strategis ketiga yaitu meningkatnya kualitas pelayanan terpadu satu pintu.

Pada tahun 2018 kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat yang diperoleh dari realisasi pendapatan dan 3 sasaran strategis menunjukkan hasil efektif ada 3 (75%) diperoleh dari sasaran strategis pertama yaitu meningkatnya tata kelola organisasi, sasaran strategis yang kedua yaitu meningkatnya realisasi investasi, dan sasaran strategis yang ketiga yaitu meningkatnya kualitas pelayanan terpadu satu pintu. Hasil tidak efektif ada 1 yaitu pada realisasi pendapatan (25%).

**PENUTUP**

**Kesimpulan**

Berdasarkan hasil analisis dengan metode *Value For Money* terhadap penelitian yang telah dilakukan, maka dapat disimpulkan bahwa:

Pengukuran ekonomi

Kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat pada tahun 2016 sampai dengan tahun 2018 ditinjau dari segi ekonomi menunjukkan hasil yang sudah ekonomis yakni secara keseluruhan pada tahun 2016 diperoleh hasil sebesar 90,23%, tahun 2017 diperoleh hasil sebesar 96,02% dan tahun 2018 diperoleh hasil sebesar 98,69%. Hal tersebut disebabkan karena Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat telah mampu mengelola keuangan dengan skala ekonomis yaitu kurang dari 100%.

1. Pengukuran efisiensi

Kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat pada tahun 2016 sampai dengan tahun 2018 ditinjau dari segi efisiensi menunjukkan hasil yang sudah efisien dan tidak ada satupun kegiatan yang menunjukkan hasil yang tidak efesien. Hal ini terlihat dari *output* pada setiap program dan kegiatan yang penulis teliti, dimana nilai *output* yang dihasilkan lebih besar dari nilai *input* yang digunakan.

1. Pengukuran efektivitas

Suatu organisasi publik dapat dikatakan efektif apabila organisasi tersebut dapat mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Efektivitas tidak menyatakan tentang seberapa besar biaya yang dikeluarkan untuk mencapai tujuan tersebut.

Dengan demikian Kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat pada tahun 2016 sampai dengan tahun 2018 ditinjau dari segi efektivitas menunjukkan hasil secara keseluruhan sudah efektif yakni pada tahun 2016 diperoleh rata-rata capaian kinerja keseluruhan sebesar 172,72%, tahun 2017 diperoleh rata-rata capaian kinerja keseluruhan sebesar 138,19%, dan pada tahun 2018 diperoleh rata-rata capaian kinerja keseluruhan sebesar 118,37%.

Pencapaian kinerja yang lebih baik disebabkan karena adanya komitmen yang kuat seluruh jajaran Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat untuk memfokuskan program dan kegiatan sesuai dengan sasaran strategis yang ditetapkan dalam Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat. Selain itu juga perlu adanya optimalisasi pencapaian kinerja pada indikator kinerja yang masih memiliki hasil yang tidak efektif.

**SARAN**

Berdasarkan kesimpulan diatas, dapat dikemukakan saran sebagai berikut :

Bagi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat.

* + - 1. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat diharapkan perlunya optimalisasi pencapaian kinerja pada indikator kinerja yang masih memiliki hasil yang tidak efektif dengan meningkatkan kemampuan aparatur dalam melaksanakan tugasnya memberikan pelayanan perizinan kepada investor, menambah Sumber Daya Manusia dan melengkapi sarana prasarana pendukung pelayanan investasi sehingga semua yang direncakan dapat tercapai sesuai dengan yang telah ditetapkan.
      2. Bagi Peneliti Selanjutnya.

Selain rasio ekonomi, rasio efisiensi dan rasio efektivitas yang dijadikan patokan dalam penilaian kinerja dalam penelitian ini, peneliti menyarankan rasio lain sebagai pendukung ketiga rasio tersebut seperti rasio kemandirian dan rasio keadilan.

**DAFTAR PUSTAKA**

Abdullah, M, 2014. Manajemen dan Evaluasi Kinerja Karyawan, Aswaja Pressindo, Yogyakarta.

Agussalim Manguluang, 2010. *Metodologi Penelitian,* Ekasakti Press, Padang

Abdul, Halim dan Syam Kususfi, 2013.*Akuntansi Sektor Publik*, Salemba Empat, Jakarta.

Fahmi, Irham, 2012. *Analisis Kinerja Keuangan*, Alfabeta, Bandung.

Mardiasmo, 2018. *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah,* Penerbit ANDI, Yogyakarta.

Mahsun, Mohammad, 2012. *Pengukuran Kinerja Sektor Publik.* BPFE, Yogyakarta.

Mahmudi, 2015. *Manajemen Kinerja Sektor Publik*. Edisi Kedua. UPP STIM YKPN, Yogyakarta

Mahmudi, 2011. *Akuntansi Sektor Publik*, UII Press, Yogyakarta

Nordiawan, Deddi dan Hertianti, Ayuningtyas, 2014. *Akuntansi Sektor Publik*, Edisi Empat, Salemba Empat, Jakarta

Rakhmat, 2017. *Administrasi dan Akuntabilitas Publik,* Penerbit ANDI. Yogyakarta.

Rudianto, 2013. *Akuntansi manajemen Informasi Untuk Pengambilan Keputusan Strategis*, Erlangga, Jakarta

Sujarweni, V. Wiratna, 2015 *Akuntansi Sektor Publik,* Pustaka Baru Press. Yogyakarta.

Wibowo, 2016. *Manajemen Kinerja.* Edisi Kelima, Rajawali Pers. Jakarta.

Khalikussabir, 2017. Analisis Kinerja Keuangan Berdasarkan *Value For Money* (Studi Kasus Pada Dinas PU Pengairan, PU Binamarga dan PU Cipta Karya kabupaten Probolinggo), *Jurnal Riset Manajemen*

Liando, H.S, Saerang, D.pt, Elim, I, 2014. Analisis Kineeja Keuangan Pemerintah kabupaten Kepulauan Sangihe Menggunakan Metode *Value For Money, Jurnal EMBA,* 2(3), 1686-1694

Purwiyanti, Dwi, 2017. Analisis Kinerja Berbasis Konsep *Value For Money* Pada Kegiatan Fisik Pekerjaan Irigasi Donggala Kadi (Studi di Dinas pekerjaan Umum Kota Palu)*, Jurnal Katalogis,* 5(3), 190-200

Pancanugraha, Indra, 2017. Analisis pengukuran Kinerja Dengan Menggunakan Pendekatan Value For Money Pada Kantor Kementrian Agama Kabupaten Poso tahun 2013-2014, *Jurnal Katalogis*, 5(6), 20-27

Arfan, Demi Aulia, 2014.*Analisis Value For Money Dalam Pengukuran Kinerja Dinas Pertanian Daerah Istimewa Yogyakarta Periode Tahun 2011-2012*. Skripsi. Universitas Negeri Yogyakarta.

Annisa, Dian, 2011. *Evaluasi Kinerja Keuangan Dinas Kesehatan Kota Makassar Melalui Pendekatan Vlue For Money.*Skripsi. Universitas Hasanuddin.

Gare, Melchior Eugenndori, 2017. *Analisis Pengukuran Kinerja Dengan Menggunakan Value For Money (Studi Kasus Pada Klinik Adhiwarga PerkumpulanKeluarga Berencana Indonesia (PKBI) Daerah Istimewa Yogyakarta)*. Skripsi.Universitas Sanata Dharma Yogyakarta.

Indriaswari, Laurensia Koen, 2017. *Analisis Value For Money Dalam Pengukuran Kinerja pada Dinas Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Banyumas Periode Tahun 2014-2016.*Skripsi*.* Universitas Sanata Dharma Yogyakarta.

Kristanti, Okky Irvina, 2016. *Analisis Kinerja Keuangan Melalui Pendekatan Value For Money (Studi Kasus di Unit Pelaksana Teknis dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kecamatan Karimunjawa).*Skripsi. Universitas Sanata Dharma Yogyakarta.

Presisca, Yuliani Levvellin, 2016. *Analisis Kinerja Keuangan Dengan Menggunakan Pendekatan Value For Money (Studi Kasus di dinas Pertanian Kabupaten Sleman Periode 2014).* Skripsi.Universitas Sanata Dharma Yogyakarta.

Sari, Ratna, 2017. *Analisis Pengukuran Kinerja Pemerintah daerah Dengan Menggunakan Prinsip Value For Money (Studi Kasus Pemerintah daerah Kabupaten Pinrang).*Skripsi.Universitas Hasanuddin Makassar.